

PERISTIWA 17 OKTOBER 1952: TENTARA PRETORIAN MODERATOR DENGAN GERAKAN ANTI-PARLEMEN PADA MASA KABINET WILOPO

Oleh:

Aldi Maulana, Ayi Budi Santosa¹

ABSTRACT

This article aimed to analyze the relationship between civil government and military leader during the Wilopo Cabinet. The main issue was how did the soldiers' attitude in the events of October 17, 1952, with the stance of the Anty-Parliament during the Wilopo Cabinet? The research method that used was the historical method which according to Helius Sjamsuddin, covering the collecting of the sources (heuristics), source criticism, and historiography. As for the results' findings in this study is the intervention over the military internal's matters and civil government which resulted in a worse relationship. Besides, the events of October 17, 1952, can be seen from different points of view, both the party pros and cons point of view by understanding the background of the occurrence of such events. Besides, reactions and responses after the events of October 17, caused friction in the internal military and civil government that could erode the country's integration. The soldiers' attitude in the events put pressure on the civil government to give political policies that took a side but has no intention to take control of the civilian Government directly (The Pretorian of Moderators' type).

Keywords: Civil government, military leaders, the Event of October 17th 1952, the Pretorian Moderator, the Wilopo Cabinet

PENDAHULUAN

Dalam membangun sebuah negara yang baik, perlu adanya hubungan yang baik pula antar alat organisasi negara. Misalnya hubungan antara pemerintahan sipil dengan pimpinan militer. Karena dengan demikian, negara mampu mengatur organisasi alat negara sesuai peranannya masing-masing. Kemudian, setiap negara memiliki hubungan antara pemerintahan sipil dengan militer yang berbeda. Seperti halnya di Inggris dan di Amerika Serikat memiliki hubungan sipil–militer yang lebih menonjolkan supremasi sipil dengan

menempatkan militer bertanggung jawab hanya dalam urusan pertahanan. Hal ini berakibat pada kedudukan militer yang subordinat terhadap kekuasaan sipil. Kedudukan ini merupakan penempatan posisi yang ideal dan sebaiknya menjadi model bagi penataan relasi sipil–militer yang demokratis di berbagai negara. Berbeda halnya dengan relasi sipil–militer di dunia Arab. Setelah masa 1970-an peran militer dalam kehidupan bernegara semakin berkurang. Namun meskipun demikian, kecenderungan yang ada telah memunculkan rezim otoritarian yang

¹Aldi Maulana adalah mahasiswa Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI, Ayi Budi Santosa adalah Dosen Pembimbing . Penulis dapat dihubungi di alamat *email*: aldihistoria19@gmail.com

menempatkan relasi sipil–militer di dunia Arab cenderung masih jauh dari kondisi demokratis. Kondisi tersebut secara otomatis memangkas demokrasi sebagai mekanisme menuju kekuasaan yang sah (Kardi, 2014, hlm. 242).

Kedua karakteristik tersebut berbeda dengan hubungan sipil dan militer di Indonesia. TNI (Tentara Nasional Indonesia) telah melakukan tugasnya dalam mengukuhkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari tahun 1945-1949 dengan ketaatannya terhadap supremasi pemerintahan sipil. Kemudian pada tahun 1950 di sahkan UUDS 1950 yang menganut sistem pemerintahan parlementer yang mengutamakan supremasi sipil di atas militer. Pro kontra terjadi akibat kondisi tersebut, banyak dari kalangan militer yang tidak menerima begitu saja terhadap supremasi sipil. Mengingat pada masa revolusi, TNI begitu masif melawan serangan militer Belanda melalui strategi perang gerilya ditengah menyerahnya pimpinan sipil terhadap Belanda. Kemudian Kondisi tahun 1950an pasca revolusi digambarkan oleh Nasution sebagai bagian dari pencarian identitas, baik itu identitas mencari sistem kenegaraan yang lebih sesuai dengan masyarakat Indonesia maupun mencari sistem ketentaraan yang sesuai dengan kepribadian dan kondisi masyarakat Indonesia dalam menghadapi tantangan (Nasution, 2013, hlm. 12-14).

Kondisitersebutmembuatpihakmiliter Indonesia merasa memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga negara lebih dari tugas militer daripada terlalu memperdulikan supremasi sipil terhadap militer. Dalam artian, pihak militer ingin selalu terlibat dalam membangun negara,

termasuk dalam mengambil keputusan dalam bidang politik secara tidak langsung. Namun hal tersebut menimbulkan penilaian yang berbeda dari pihak sipil bahwa pihak militer terlalu masuk ke dalam wilayah tugas pemerintahan sipil. Begitupun sebaliknya, pihak militer merasa mendapatkan intervensi dari pihak sipil terhadap persoalan internal militer. Sehingga kondisi tersebut menimbulkan ketegangan diantara kedua kelompok yang puncaknya pada peristiwa 17 Oktober 1952 dengan aksi anti-parlemen. Dari latar belakang tersebut, penulis merumuskan persoalan utama yaitu, bagaimana sikap tentara dalam peristiwa 17 Oktober 1952 dengan mengeluarkan sikap anti-parlemen pada masa Kabinet Wilopo? Kemudian tanggapan beragam muncul setelah peristiwa 17 Oktober 1952, baik tanggapan yang pro maupun yang kontra. Persoalan utama tersebut menjadi fokus utama kajian penulis dalam artikel ini. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka dalam tulisan ini akan mencoba menganalisis hubungan sipil dan militer dalam peristiwa 17 Oktober 1952 dengan menguraikan berbagai faktor munculnya gerakan anti-parlemen, serta tanggapan dari dua sisi baik pihak yang pro maupun pihak yang kontra terhadap peristiwa tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan tiga langkah dalam metode sejarah menurut Helius Sjamsuddin yakni heuristik, kritik (eksternal dan internal), dan historiografi. Menurut Carrard (dalam Sjamsuddin, 2012, hlm. 67) heuristik merupakan sebuah kegiatan mencari sumber-sumber, untuk mendapatkan data-data

atau materi sejarah atau evidensi sejarah. Tahap ini merupakan tahap awal dalam penelitian. Penulis melakukan heuristik dengan mencari beberapa sumber ke beberapa tempat. Seperti perpustakaan UPI, Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Nasional, toko buku, koleksi pribadi, serta tempat-tempat lain untuk mendapatkan sumber yang terkait, serta mengunjungi website maupun blog yang dapat dipercaya yang menambah data-data yang dibutuhkan.

Kemudian setelah melakukan heuristik, penulis kemudian mengidentifikasi sumber-sumber tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan sumber yang relevan dengan penelitian ini dengan melakukan kritik sumber. Sehingga penulis dapat mengklasifikasikan sumber utama dan sumber pendukung. Kritik sumber adalah suatu proses pengujian dan penyelidikan terhadap sumber-sumber untuk diketahui otentisitas (keaslian sumber) dan kredibilitas (tingkat kebenaran informasi) sumber sejarah. Penentuan keaslian suatu sumber berkaitan dengan bahan yang digunakan oleh sumber tersebut, atau biasa disebut kritik eksternal. Sedangkan, penyeleksian informasi yang terkandung dalam sumber sejarah, dapat dipercaya atau tidak, disebut dengan kritik internal (Hamid dan Madjid, 2011, hlm. 47-48). Adapun fungsi dari kritik sumber ini yaitu erat kaitannya dengan tujuan sejarawan itu sendiri untuk mencari kebenaran, sejarawan dihadapkan dengan kebutuhan untuk membedakan apa yang benar, apa yang tidak benar, apa yang mungkin, dan apa yang meragukan atau mustahil (Sjamsuddin, 2012, hlm. 103).

Historiografi merupakan langkah terakhir dalam metode sejarah. Ketika sejarawan memasuki tahap menulis,

maka ia mengerahkan seluruh daya pikirannya, bukan saja keterampilan teknis penggunaan kutipan-kutipan dan catatan-catatan, tetapi yang paling utama penggunaan pikiran-pikiran kritis dan analisisnya karena ia pada akhirnya harus menghasilkan sintesis dari seluruh hasil penelitiannya atau penemuannya itu dalam suatu penelitian yang utuh. Kemudian Sjamsuddin (2012, hlm. 121) membagi tahapan historiografi ke dalam tiga tahap yakni penafsiran (interpretasi), penjelasan (eksplanasi), dan penyajian (ekspose). Pada bagian penafsiran telah dijelaskan sebelum memasuki tahap historiografi. Tahap penjelasan (eksplanasi) merupakan salah satu tahapan yang menjadi pusat utama dalam penulisan sejarah. Salah satu ciri utama eksplanasi dalam sejarah adalah urutan-urutan dalam kejadian dari suatu peristiwa. Eksplanasi yang baik ialah ketika peristiwa masa lalu yang direkonstruksi tampak 'hidup' di tengah kehidupan kita.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian masalah di bidang pertahanan dan keamanan Indonesia pada masa itu masih menjadi pusat perhatian pemerintah. Hal tersebut ditempuh dengan cara menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara serta meningkatkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketentraman (Simanjuntak, 2013, hlm. 128). Persoalan yang harus ditangani oleh pemerintah adalah menangani masalah angkatan perang yang pada waktu itu masih sangat heterogen. Pemerintah terus mencoba untuk mencari penyelesaian dari permasalahan tersebut, dengan menjadikan tentara memiliki semangat homogen seperti halnya yang terdapat di negara modern.

Selain itu, akibat adanya krisis ekonomi maka mengharuskan mengurangi pengeluaran negara disetiap bidang pemerintahan. Adanya pengurangan anggaran tersebut membuat kementerian pertahanan ingin melakukan demolisasi besar-besaran dengan mengadakan standar kualifikasi terhadap TNI. Karenanya, mau tidak mau pimpinan Angkatan Perang harus menetapkan persyaratan-persyaratan seperti menyangkut usia, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya bagi anggota-anggota Angkatan Perang (Soebagijo, dkk, 1979, hlm. 130-131).

Pada akhirnya permasalahan mengenai angkatan perang ini berbuntut panjang ditandai dengan mulai diperdebatkannya dalam parlemen antara kubu yang pro dan kubu yang kontra terhadap kebijakan pemerintah tersebut (Simanjuntak, 2013, hlm. 130). Perdebatan tersebut berlangsung berbulan-bulan dan ketegangan kemudian meningkat setelah keluarnya mosi Zainul Baharudin (tidak berpartai) yang tidak percaya terhadap Menteri Pertahanan dan Angkatan Perang atas kebijakan yang dikeluarkannya (Soebagijo, dkk. 1979, hlm. 131).

Namun menurut Nasution (2013, hlm. 18) awal ketegangan dan perdebatan mengenai permasalahan militer diawali dari surat Kol. Bambang Supeno, yaitu bahwa:

“Banyaklah terus ketegangan-ketegangan, dan “meletus” keluar dengan peristiwa “surat Kol. Bambang Supeno” terkenal, yang kemudian dimuat di koran-koran tertentu. Surat itu menyalahkan beleid pimpinan. Kementerian Pertahanan dan AD dan mendesak peninjauan kembali. Kemudian isi surat itu menjadi acara di

DPRS, berbulan-bulan lamanya sampai melontarkan mosi Manai Sofyan terkenal, yang oleh rapat panglima dianggap sebagai membenarkan isi surat kolonel tersebut dan yang dirasakan sebagai “intervensi” dalam soal intern AD”.

Senada dengan pendapat Nasution, Chompton (1992, hlm. 5) mengemukakan bahwa perdebatan di dalam parlemen menyangkut hubungan sipil dan militer pada masa Kabinet Wilopo yaitu diawali dengan surat Kol. Bambang Supeno yang secara terbuka mengungkapkan ketidakpuasaannya kepada pimpinan tentara. Adapun penyebab Kol. Bambang Supeno bertindak demikian, antara lain bahwa

Tuduhan-tuduhan ini harus dilihat dengan mengingat kritik-kritik yang telah dilontarkan Bambang Supeno beserta sekolah perwira Tjandradimuka yang dipimpinnya. Dikatakan bahwa sekolah itu yang berlaku adalah semangat militer gaya Jepang, yang menekankan ideologis dan politis tentara. Tatkala semangat semacam itu dikritik oleh para tokoh militer profesional dan non-politisi, Bambang Supeno mengadakan persoalan ini kepada Presiden Soekarno.

Kemudian Bambang Supeno ditegur dalam sebuah rapat perwira tinggi pada tanggal 2 Juli Karena dianggap melakukan sesuatu diluar kewenangannya. Kemudian pada tanggal 16 Juli, Bambang Supeno dicopot dari jabatannya karena menentang atasannya dan di setujui oleh Hamengkubuwono IX pada tanggal 29 Juli. Seminggu setelah pencopotan Kol. Bambang Supeno, persoalan tersebut ternyata masuk ke dalam rapat kabinet. Desas-desus menyatakan bahwa

Sultan Hamengkubuwono IX ingin mengemban seluruh tanggung jawab dari tindakan kementeriannya, tetapi ia tidak akan menerima campur tangan Presiden. Kemudian surat Bambang Supeno ditanggapi secara langsung oleh parlemen. Mula-mula di bahas dalam seksi pertahanan, lalu dibawa ke sidang pleno pada tanggal 28, 29, dan 30 Juli. Setelah reses bulan Agustus, persoalan tersebut dibuka kembali pada tanggal 23 September dalam sidang terbuka (Compton, 1992, hlm. 6-7).

Perdebatan yang terjadi di parlemen selama berbulan-bulan mengenai masalah pro dan kontra terhadap kebijakan Menteri Pertahanan dan pimpinan Angkatan Darat melalui kaum politisi menimbulkan reaksi dari pihak Angkatan Darat (Poesponegoro dan Notosusanto, 2010, hlm. 312). Kemudian hasil dari keputusan mosi tersebut hanya dapat dilihat dari hasil perdebatan di parlemen, sebagaimana yang dimuat dalam Surat Kabar Haluan Umum Nasional tanggal 17 Oktober 1952: 1 bahwa:

“Usul mosi Manai Sophian cs dalam sidang parlemen pleno terbuka hari ini diterima dengan suara 91 lawan 54... setelah sidang parlemen selesai, Sidik Ketua Umum PNI mengeluh persoalan2 jang terachir disekitar mosi itu, tidak mau banjak menerangkan sesuatunja, hanja diterangkan bahwa dengan menjerahkan kemungkinan percobaan Pimpinan dan organisasi Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang kepada panitia adalah bagi PNI usaha jang sungguh2 untuk menghindari krisis kabinet”.

Hal tersebut menimbulkan reaksi dari pihak militer, bahwasanya perdebatan

panjang di parlemen merupakan bentuk intervensi yang nyata terhadap persoalan internal militer. Pemimpin militer kemudian melakukan beberapa rapat pimpinan membahas tentang diterimanya mosi Manai Sophian dengan memutuskan akan membuat pernyataan yang akan disampaikan kepada Presiden dan kepada umum (Nasution, 2013, hlm. 35-36).

Hasil rapat-rapat pimpinan Angkatan Darat dapat terlihat nyata dari apa yang terjadi pada tanggal 17 Oktober 1952, kemudian Compton (1992, hlm. 11) mendeskripsikan jalannya peristiwa 17 Oktober sebagai berikut:

“Pagi sekali pada tanggal 17 Oktober, kerumunan hampir 10.000 orang berdemosntrasi di dalam dan di sekitar gedung parlemen di Jakarta. Mereka merusak parabol dan mengacungkan poster-poster yang menuntut pembubaran parlemen. Kerumunan lainnya berdesakan di sekitar dekat gedung kabinet. Para demonstran akhirnya sampai di Istana Presiden”.

Sementara pasukan tentara bersiap di seputar massa, Presiden Soekarno menyampaikan sebuah pidato cemerlang, disampaikan dengan gayanya yang tenang dan membakar. Ia menyatakan bahwa ia tidak dapat membubarkan Parlemen, dan bahwa ia tidak punya niat untuk menjadi diktator. Ia mengingatkan massa bahwa mereka hanyalah sebuah segmen kecil dari penduduk di sebuah kota di Indonesia; ia harus berkeliling negeri dan mempertimbangkan pendapat rakyat di kawasan-kawasan lain, begitu ia mengakhiri pidatonya, massa bubar.

Aksi demonstrasi dengan slogan “bubarkan parlemen” tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap parlemen

yang dianggap terlalu ikut campur urusan internal militer, terlebih kurang kepercayaan militer terhadap parlemen juga disebabkan oleh keterwakilan orang-orang yang berada di parlemen yang bukan hasil dari pemilihan umum. Hal tersebut merupakan kritikan yang telah lama disuarakan mengenai pentingnya untuk segera melangsungkan pemilihan umum. Terlebih mereka yang berada di parlemen bukan orang-orang yang telah berjuang melepaskan belenggu dari keinginan Belanda untuk menguasai kembali Indonesia dengan jalan Revolusi Fisik. Pihak militer merasa bahwa tidak etis parlemen dengan orang-orang tersebut mengurus urusan militer yang memiliki peran serta kontribusi yang besar dalam perang kemerdekaan. Sehingga slogan anti-parlemen terus disampaikan sebagai bentuk penyampaian aspirasi yang mereka anggap sebagai suatu keharusan dalam mengingatkan pemerintahan sipil dalam mengambil keputusan politis.

Peristiwa 17 Oktober 1952 kemudian banyak mendapat tanggapan dari berbagai pihak diantaranya. Menurut Wilson (2015, hlm. 157) mengatakan bahwa “Pameran kekuatan ini mencerminkan kelatihan zaman itu. Tindakan tersebut tidak dapat dianggap bijaksana”. Kemudian Soekarno menganggap peristiwa 17 Oktober 1952 ini sebagai “percobaan setengah kudeta” sebuah istilah yang disampaikan sendiri oleh Nasution kepada Soekarno. Menurut Jenderal Nasution bahwa upaya kudeta tersebut bukan ditujukan kepada Bung Karno, melainkan kepada sistem pemerintahan. Mereka menuntut Soekarno membubarkan parlemen, namun Soekarno menolak keinginan tersebut (Wilson, 2015, hlm. 158).

Tanggapan lain datang dari Feith (dalam Lubis, 2012, hlm. 73) bahwa meskipun terdapat bukti-bukti yang saling bertentangan, dapat dianggap sebagai sudah pasti bahwa Nasution sejak beberapa waktu telah menyusun rencana-rencana bagi suatu kudeta militer yang akan dilaksanakan dengan jalan mengarahkan Divisi Siliwangi. Rencananya adalah untuk meletakkan kekuasaan yang lebih besar di tangan Presiden, lalu dalam waktu dekat yang bersamaan membuatnya tergantung kepada dukungan tentara.

Kemudian Nasution (2013, hlm. 10) menjelaskan bahwa peristiwa 17 Oktober 1952 terjadi sebagai aksi untuk menyampaikan aspirasi mereka yaitu bahwa:

“Dasar penilaian demikian ialah, bahwa peristiwa tersebut menuntut pembubaran DPRS, hasil kompromis antara RI dan “Negara-negara van Mook”. Dengan proses DPRS yang kami rasakan sebagai inervensi terhadap integritas TNI, maka KSAD bersama 7 Panglima Terr dengan tertulis mendesak pembubaran DPRS dan kembalinya Soekarno-Hatta memimpin kita, mendesak dengan tekanan maksimal”.

Nasution (2013, hlm. 25-26) kemudian tidak merasa heran dengan apa yang menjadi pemberitaan mengenai peristiwa 17 Oktober 1952 yang dianggap sebagai percobaan kudeta, seperti halnya yang ia katakan bahwa tuntutan politik dengan kesimpulan-kesimpulan yang tersebut di atas tadi, maka tak mengherankan, jika gerakan-gerakan pada tangga 17 Oktober’52 itu diartikan orang sebagai petunjuk seakan-akan telah terjadi suatu percobaan yang sifanya sama dengan suatu “coup d’etat”.

Untuk meredakan situasi Perdana Menteri Wilopo kemudian memanggil para Panglima Divisi dari pimpinan Angkatan Darat, Wilopo menegaskan bahwa parlemen tidak dapat dibubarkan begitu saja. Akan tetapi Perdana Menteri meminta mereka mempercayakan kepada pemerintah mengenai pembentukan DPR secepatnya. Kemudian mereka menghargai permintaan tersebut (Nasution, 2013, hlm. 37-38). Senada dengan yang dikatakan Nasution, Perdana Menteri Wilopo kemudian menyampaikan pandangannya terkait peristiwa 17 Oktober 1952, Sebagaimana yang dimuat dalam Surat Kabar Merdeka tanggal 18 Oktober 1952, hlm. 1 yaitu bahwa:

“...Perdana Menteri Wilopo menerangkan bahwa dalam pertemuan itu antara lain telah dibicarakan bagaimana mengatasi keadaan sekarang. Menurut Wilopo jalan untuk mengatasi keadaan telah diketemukan....Perdana Menteri Wilopo selanjutnya menerangkan bahwa pemilihan umum akan lebih dipertcepat lagi”.

Kemudian demonstrasi terjadi di kota lain yaitu di Semarang dengan menuntut dibubarkannya parlemen. Seperti halnya yang dimuat dalam Surat Kabar Merdeka tanggal 20 Oktober 1952, hlm. 2 yaitu bahwa:

“Setelah pada hari Djumat di Djakarta terjdadi demonstrasi jang menghendaki pembubaran parlemen, maka djuga di Semarang pada hari Senin pagi mengalami demonstrasi jang sematjam itu. K.I 3000 orang dengan setjara teratur dab tenteram berkumpul dimuka kantor gubernur dengan

membawa poster2 dan bendera2 merah-putih”.

Berdasarkan beberapa tokoh yang menanggapi peristiwa 17 Oktober 1952, yang salah satunya menurut Soekarno bahwa peristiwa tersebut merupakan upaya setengah kudeta. Kemudian untuk menjawab hal tersebut, penulis mencoba menganalisis berdasarkan kajian yang didapatkan mengenai kudeta militer bahwa terdapat beberapa jenis yang memiliki ciri dan karakteristik tersendiri dalam kudeta atau perebutan kekuasaan dan militer tentunya memiliki peranan yang cukup besar. Bahkan kudeta seakan identik dengan kekuatan militer. Situasi di mana tentara tampil sebagai aktor politik utama dan dominan yang secara langsung menggunakan kekerasan atau mengancam untuk merebut kekuasaan.

Dari berbagai pendapat beberapa tokoh mengenai peristiwa 17 Oktober 1952, dapat dianalisis bahwa sikap militer dalam peristiwa tersebut termasuk ke dalam kelompok Pretorian Moderator. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nordlinger (1990, hlm. 35) bahwa tentara Pretorian Moderator memiliki ciri dengan tidak menguasai pemerintahan secara menyeluruh, tetapi mengawasi pemerintahan sipil dengan tidak serta merta menerima supremasi penuh dari pihak sipil. Ciri lain dari Pretorian Moderator tersebut yaitu dengan bertindak sebagai kelompok yang berpengaruh dan terlibat dalam politik, terkadang juga mengancam pemerintah untuk kudeta dan menggantinya dengan pemerintahan sipil lain yang sejalan dan dapat diterima oleh militer. Tentara Pretorian Moderator ini menghindari diri untuk menguasai

pemerintahan. Mereka mempertahankan status quo, menjaga keseimbangan kelompok yang sedang bersaing, dan menjaga stabilitas pemerintahan. Dalam menjalankan misinya, tentara protarian moderator ini bertindak sebagai penekan, namun secara tidak langsung mengarahkan pemerintah sipil atas dasar kemauannya.

Ciri-ciri tersebut memiliki kesamaan dengan peristiwa 17 Oktober dimana aksi tentara yang mengepung istana dengan menempatkan tank dan persenjataan yang lainnya ke depan istana dengan tujuan mengancam pemerintahan sipil supaya dapat dikendalikan sesuai keinginannya. Hal tersebut disebabkan oleh anggapan pihak militer yang merasa pemerintahan sipil terlalu ikut campur akan urusan internal Angkatan Darat. Karena hal tersebut, pihak militer menginginkan untuk dibubarkannya parlemen.

Tentara Pretorian Moderator tersebut cenderung menghindari untuk menguasai pemerintahan secara langsung. Dan hal tersebut sesuai dengan yang terjadi pada peristiwa 17 Oktober, bahwa kekuatan militer yang dipamerkan di depan istana namun sama sekali tidak digiunakan untuk melakukan serangan. Dan aksi tersebut hanya berjalan sebentar hingga massa membubarkan diri. Dalam artian mereka hanya mengancam dan tidak berniat untuk melakukan kudeta sebagaimana yang telah A.H. Nasution jelaskan di atas.

Setelah peristiwa 17 Oktober 1952, untuk menjaga keamanan maka diterapkan kebijakan keamanan di sepanjang jalanan dan jam malam. Diikuti dengan pemutusan seluruh hubungan telepon. Diketahui ada penangkapan 6 anggota parlemen dan pembredelan beberapa surat kabar, kemudian diberlakukan aturan larangan

bersidang atau mengadakan rapat lebih dari 5 orang (Soebagijo, dkk. 1979, hlm. 132).

Kemudian berbagai reaksi bermunculan setelah peristiwa 17 Oktober tersebut, kemudian terdapat golongan yang pro dan golongan yang kontra di dalam masyarakat umum, termasuk di dalam tubuh Angkatan Darat. Sehingga hal tersebut memicu perpecahan di dalam TNI AD yang meluas sampai ke divisi-divisi di beberapa daerah. Di beberapa komando Tentara dan Teritorial timbul reaksi berupa pengambil alihan pimpinan, yaitu di Sumatera bagian Selatan, Jawa Timur, dan Sulawesi. Kemudian di pimpinan pusat, Jenderal A.H. Nasution dicopot dan digantikan oleh Kolonel Bambang Sugeng (Soebijono, dkk. 1993, hlm. 21-22).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penulis dalam penelitian ini, dapat di tafsirkan bahwa buruknya hubungan sipil dan militer disebabkan oleh adanya sikap saling curiga satu sama lain yang dianggap saling melakukan intervensi, menimbulkan tidak adanya rasa percaya diantara keduanya. Hal tersebut dapat dipahami bahwasanya persoalan internal militer tidak dapat diselesaikan di ruang internal militer, akan tetapi persoalan tersebut semakin meluas di muka publik seperti halnya masuk ke dalam sidang pleno parlemen. Sehingga hal tersebut menimbulkan kegaduhan yang berkepanjangan.

Selain itu, tingkat kepercayaan militer terhadap parlemen sangat kecil karena mereka menganggap perwakilan rakyat yang berada di parlemen bukan atas kehendak rakyat, dalam artian bukan hasil dari pemilihan umum. Maka tidak

mengherankan dalam aksi tersebut muncul slogan “bubarkan parlemen” dan “segera melaksanakan pemilu”. Faktor-faktor tersebut merupakan sikap saling menginginkan perubahan diantara dua instansi tersebut yang sama-sama mereka tidak inginkan adanya desakan tersebut.

Kemudian mengenai sikap militer dalam peristiwa 17 Oktober 1952 merupakan aksi penyampaian aspirasi yang bersifat memaksa untuk mempengaruhi kebijakan politis ke arah apa yang mereka inginkan, dalam artian menggunakan ancaman yang kuat namun tidak memiliki keinginan untuk mengambil kekuasaan dari pihak sipil atau yang dalam konsep kudeta militer diistilahkan sebagai tentara Pretorian Moderator. Kemudian peristiwa 17 Oktober 1952 berdampak pada munculnya dua kubu yang berselisih, yaitu pihak yang pro dan pihak yang kontra terhadap peristiwa tersebut. Hal tersebut berdampak pada semakin tidak harmonisnya hubungan antara pemerintahan sipil dengan pimpinan militer yang bisa saja mengancam integrasi negara.

Berdasarkan penelitian ini, sudah sewajarnya Indonesia belajar dari peristiwa 17 Oktober 1952 untuk mencapai integrasi organisasi alat negara yang memiliki keharmonisan dan kolaborasi yang baik, sehingga cita-cita untuk menciptakan keamanan negara dapat terjamin dengan baik. Maka dari itu perlu untuk melakukan rekonsiliasi dalam menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi untuk mengurangi kegaduhan dan saling curiga diantara pihak yang berselisih.

DAFTAR PUSTAKA

- Compton, B.R. (1992). *Kemelut Demokrasi Liberal: Surat-surat Rahasia*. Jakarta: LP3ES.
- Hamid, A. dan Madjid, M.S. (2011). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Kardi, K. (2014). *Demokratisasi Relasi Sipil-Militer pada Era Reformasi di Indonesia*. *Jurnal Sosiologi*. 19, (2). 231-256.
- Lubis, Z. (2012). *Kolonel Misterius di Balik Pergolakan TNI AD*. Jakarta: Kompas.
- Nasution, A.H. (2013). *Peristiwa 17 Oktober 1952: Ketika “moncong” Meriam Mengarah ke Istana Merdeka*. Yogyakarta: Narasi.
- Nordlinger, E.A. (1990). *Militer dan Politik: Kudeta dan Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Poesponegoro, M.D. dan Notosusanto, N. (2010). *Sejarah Nasional Indonesia VI: Edisi Pemutakhiran*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Redaksi. (1952, 17 Oktober). “Krisis Kabinet Mengantjam?”. *Haluan Umum Nasional*, hlm. 1.
- Redaksi. (1952, 20 Oktober). “Djuga di Semarang Diadakan Demonstrasi”. *Merdeka*, hlm. 2.
- Soebagijo, dkk. (1979). *Wilopo 70 Tahun*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sjamsuddin, H. (2012). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Simanjutak, P. N. H. (2013). *Kabinet-kabinet Indonesia dari Awal Kemerdekaan sampai Reformasi*. Jakarta: Djambatan.
- Soebijono, dkk. (1993). *Dwifungsi ABRI: Perkembangan dan Peranannya*

- dalam Kehidupan Politik di Indonesia.* Wilson. (2015). *Soekarno, Komunisme, dan Fasis ORBA.* Malang: Intrans Publishing.
- Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wilopo. (1952, 18 Oktober). "*Tidak Ada Krisis Kabinet*". Merdeka, hlm. 1.